

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian & pembahasan dalam bab sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Politik Hukum Penerapan ETLE, dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) merupakan perwujudan dari arah kebijakan negara untuk melakukan modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang beralih dari pola konvensional menuju sistem digital berbasis bukti elektronik. Kebijakan ini secara politik bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, objektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi demi mencapai efisiensi dalam penegakan hukum nasional.
2. Bahwa pencerminan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas yang mana Penerapan ETLE telah mencerminkan prinsip transparansi melalui penggunaan bukti digital yang terverifikasi dan akuntabilitas melalui sistem pendokumentasian yang terintegrasi, yang secara signifikan mampu meminimalisir praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Secara efektif, sistem ini berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat meskipun dalam implementasinya masih menghadapi kendala teknis terkait integrasi data kendaraan dan kesiapan infrastruktur di berbagai daerah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Integrasi Data, Pemerintah dan Polri perlu mempercepat pemerataan infrastruktur ETLE serta mengintegrasikan database kendaraan bermotor secara menyeluruh. Langkah ini krusial untuk menjamin validitas data, meminimalisir kesalahan penindakan (error), dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Pengembangan SDM dan Literasi Publik, Polri harus meningkatkan kompetensi teknis personel melalui pelatihan berkelanjutan, serta mengintensifkan edukasi publik mengenai mekanisme ETLE dan prosedur sanggahan. Hal ini diperlukan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bernard L. Tanya, dkk., 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta

Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 2020, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu, and Pramukhtiko Suryokencono. 2024, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 vol 9

Alfarisi, Salman, and Muhammad Syaiful Hakim. 2019, "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* vol 1, no. 2 hal 20–28.

Amin Bagus Fanani. 2025, "Penegakan Hukum Melalui Elektronik Traffic

Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor.” *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa vol 7*, no. 1 hal 1–17.

Bayu Ramadan Baskoro, Rommy Pratama, Mamay Komariah, dan Harun Pandia, 2024, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polres Metro Tangerang Kota”, Vol. 3, No. 1, hlm. 21–29.

Cahyani, Tinuk Dwi, 2025 “Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) T...,” hal 1–19.

Charles Rio Valentine Pardede, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Mendukung Terwujudnya Road Safety Policing (Studi Kasus Polda Banten)", *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 25, No. 1, 2022, hlm. 65–66.

Eko Setiawan, 2024 “Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Penegakan Hukum dalam Implementasi Tilang Elektronik”, *The Juris*, Vol. 8, No. 2, hlm. 504–507.

Lutfia, Vivi, 2021 “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Lex Renaissance* vol 6, no. 4 ,hal 91

Muhammadi Mukhtari, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, 2023, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Legality of Law*,

Vol. 5, No. 2, hlm.249.

R., Wahyudi B. 2025 “Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 hal 34-51

Raja Desril*, Elviandri, Aksar, Raihana, Sommaliagustina, Desi, and Tri Wahyuni Lestari. 2018, “Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas Sebagai Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas” vol 2, no. 2 hal 93–103.

Samsiah, Tuti, Dewi Iryani, Puguh Aji, Hari Setiawan, and Universitas Bung Karno. 2024, “Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas” vol 3, no. 2 hal 111–19.

Tiessa, Amelia Noviana, Jaya Lesmana, and Ratna Indayatun. 2025, “Analisis Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Kabupaten Tangerang Analysis of the Effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) in the Law Enforcement System in Tangerang Regency.” *vol* 8, no. 1 hal: 1–11.

Wardana, Rizky, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, and Nabila Annisa Fuzain. 2024, “Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas Oleh Lembaga Kepolisian.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* vol 4, no. 8 hal 1–19.

Wicaksono, Dian Agung. 2020, “Jurnal Recht Vending.” *Jurnal Recht*

VendingMedia Pembinaan Hukum Nasional Vol 9 hal 311–29.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

INTERNET / WEBSITE

Media Indonesia. “70 Titik Kamera Tilang Elektronik Tahap III Akan Terinstal Tahun Ini.” <https://mediaindonesia.com>.